

**MASALAH KONTEMPORER
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH**

MASALAH KONTEMPORER PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH

Editor:

Carunia Mulya Firdausy

Penulis:

Carunia Mulya Firdausy

Rasbin

Achmad Sani Alhusain

Juli Panglima Saragih

Mandala Harefa

Ari Mulianta Ginting

Lisnawati

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jakarta, 2018

Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah/Carunia Mulya
Firdausy (ed) —Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

xiv + 178 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-703-2

Judul:
Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah
Carunia Mulya Firdausy (ed.)

Copyrights © 2018
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018
YOI: 1591.36.145.2018
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
[http: www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)
Yayasan Pustaka Obor (FB)
[pustakaobor_id \(IG\)](https://www.instagram.com/pustakaobor_id)

KATA PENGANTAR

Dr. Indra Pahlevi

Kepala Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul *Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah* yang disusun oleh peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan khusus terhadap permasalahan perekonomian nasional dan daerah

Struktur buku ini terdiri atas 8 (delapan) bagian tulisan yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh perekonomian nasional dan daerah. Bagian pertama dan terakhir buku ini merupakan prolog dan epilog yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buku ini dan telah dibuat oleh Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU selaku editor buku ini.

Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri atas Mandala Harefa, Juli Panglima Saragih, Achmad Sani Alhusain, Ari Mulianta Ginting, Rasbin, dan Lisnawati yang

Dr. Indra Pahlevi

telah menghadirkan beragam warna mengenai buku ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dan telah memberikan masukan yang berharga bagi penyelesaian buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya. Namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, September 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii

Bagian Pertama

Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah: Suatu Pengantar

Carunia Mulya Firdausy	1
------------------------	---

Bagian Kedua

Nilai Tukar, Ekspor Industri Manufaktur dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Tinjauan Literatur

Rasbin	9
I. Pendahuluan	9
II. Devaluasi/Depresiasi Nilai Tukar: Instrumen untuk Mendorong Ekspor Industri Manufaktur	12
III. Kompensasi Dampak Negatif dari Devaluasi Nilai Tukar Stabilisasi Biaya Hidup	16
IV. Penutup	22
Daftar Pustaka	25

Bagian Ketiga

Investasi dan Pengaruhnya pada Pembukaan Lapangan Pekerjaan

Achmad Sani Alhusain	29
----------------------	----

I.	Pendahuluan	29
II	Pengertian, Jenis dan Karakteristik, Manfaat serta Faktor Penentu Investasi	32
III.	Kebijakan Ekonomi untuk Peningkatan Investasi	40
IV.	Perkembangan Investasi dan Pengaruhnya pada Pembukaan Lapangan Kerja	45
V.	Penutup	52
	Daftar Pustaka	53
Bagian Keempat		
Urgensi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan		55
Juli Panglima Saragih		
I.	Pendahuluan	55
II.	Kondisi Energi Listrik Saat ini	60
III.	Program Ketahanan Energi (Listrik)	62
IV.	Pemanfaatan/Pengembangan (Sumber) Energi Terbarukan	56
V.	Penutup	79
	Daftar Pustaka	81
Bagian Kelima		
Evaluasi Desentralisasi Kebijakan Transfer Fiskal dan Upaya Perbaikan		
Mandala Harefa		
I.	Pendahuluan	83
II.	Perkembangan dan Permasalahan Kebijakan Fiskal	86
III.	Transfer Fiskal dalam Konsep Otonomi	90
IV.	Implementasi Kebijakan Transfer Fiskal	95
V.	Upaya Perbaikan Kebijakan Transfer Fiskal	107
VI.	Penutup	114
	Daftar Pustaka	117

Bagian Keenam

Desentralisasi dan Pelayanan Publik di Provinsi Yogyakarta

Ari Mulianta Ginting

- | | | |
|------|--|-----|
| I. | Pendahuluan | 119 |
| II. | Desentralisasi Fiskal dengan Pelayanan Publik | 123 |
| III. | Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pelayanan Publik di Provinsi D.I. Yogyakarta | 126 |
| IV. | Penutup | 134 |
| | Daftar Pustaka | 136 |

Bagian Ketujuh

Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro

Lisnawati

- | | | |
|------|---|-----|
| I. | Pendahuluan | 139 |
| II. | Otonomi dan Keuangan Daerah | 143 |
| III. | Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro | 146 |
| IV. | Penutup | 156 |
| | Daftar Pustaka | 158 |

Bagian Delapan

Kebijakan Mengatasi Masalah Perekonomian Nasional dan Daerah: *A Way Forward*

Carunia Mulya Firdausy

- | | | |
|------|---|-----|
| I. | Pendahuluan | 159 |
| II. | Kebijakan Mengatasi Depresiasi Rupiah terhadap Inflasi | 160 |
| III. | Kebijakan Pengembangan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja | 162 |
| IV. | Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Bagi Pasokan Listrik | 162 |
| V. | Kebijakan Desentralisasi Kebijakan Transfer Fiskal | 163 |

VI. Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pelayanan Publik	164
VII. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	166
Indeks	169
Tentang Editor	173
Tentang Penulis	175

DAFTAR TABEL

Bagian Ketiga	29
Investasi dan Pengaruhnya pada Pembukaan Lapangan Kerja	
Tabel 1. Paket Kebijakan Ekonomi	40
Bagian Keempat	55
Urgensi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	
Tabel 1. Potensi Energi Terbarukan Indonesia (Tahun 2015)	58
Tabel 2. Biaya (Harga) Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2015	75
Bagian Keenam	119
Desentralisasi dan Pelayanan Publik di Provinsi Yogyakarta	
Tabel 1. Hasil Uji Chow Test	127
Tabel 2. Hasil Uji Hausman Test	127
Tabel 3. Hasil Regresi Panel	128
Bagian Ketujuh	139
Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro	
Tabel 1 Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2008-2017	141

Tabel 2	Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2008-2017	142
Tabel 3	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro 2009-2016	147
Tabel 4	Pajak Unggulan Kabupaten Bojonegoro 2009- 2017	156

DAFTAR GAMBAR

Bagian Kedua	19
Nilai Tukar, Ekspor Industri Manufaktur, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Tinjauan Literatur	
Gambar 1. Devaluasi Nilai Tukar, Ekspor Industri Manufaktur dan Kompensasi	12
Bagian Ketiga	29
Investasi dan Pengaruhnya pada Pembukaan Lapangan Kerja	
Grafik 1. Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia Tahun 2008 – 2017	44
Grafik 2. Perkembangan realisasi PMDN dan PMA, Januari-Juni 2017 dan 2018	49
Grafik 3. Perkembangan Realisasi Investasi 2013 – Juni 2018: Per Kuartal	47
Grafik 4. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2013 – Juni 2018 Per Kuartal	49
Bagian Kelima	83
Evaluasi Desentralisasi Kebijakan Transfer Fiskal dan Upaya Perbaikan	
Gambar 1. Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2014-2018	88
Grafik 2. Perkembangan Dana Perimbangan, 2013- 2017	98

Grafik 3.	Perkembangan Total Dana Perimbangan Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, 1996- 2009	99
Grafik 4.	Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2013- 2017	100
Grafik 5.	Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2013-2017	102
Grafik 6.	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik, 2013-2017	104
Gambar 7.	Perkembangan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh, 2013- 2017	106
Bagian Keenam		119
Desentralisasi dan Pelayanan Publik di Provinsi Yogyakarta		
Gambar 1.	Proporsi Belanja Pendidikan Kota/Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta	131
Gambar 2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2015 (Persen)	132
Gambar 3.	Proporsi Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta	134

BAGIAN PERTAMA

MASALAH KONTEMPORER PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH: SUATU PENGANTAR

Carunia Mulya Firdausy¹

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 ini tidak pernah mampu mencapai angka 6 persen per tahun. Pada tahun 2018 diperkirakan angka pertumbuhan juga tidak akan mampu mencapai angka pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 5,4 persen. Diperkirakan angka pertumbuhan yang akan dicapai pada tahun 2018 yakni 5,17 persen. Bahkan Bank Dunia dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 hanya sebesar 5,1 persen (*Kompas*, 22 Oktober 2018). Selain melesetnya capaian angka pertumbuhan, beberapa asumsi APBN yang ditetapkan pada tahun 2018 ternyata juga tidak mampu dicapai, khususnya terkait dengan harga minyak bumi per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan sebesar US\$48 per barel, misalnya, ternyata faktanya tahun 2018 mencapai nilai di atas US\$60 per barel. Demikian pula dengan nilai kurs rupiah per dolar Amerika yang ternyata juga tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp13.400. Lebih miris lagi, nilai tukar

¹ Profesor Riset Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI dan Guru Besar Ilmu ekonomi Universitas Tarumanagara.

rupiah terhadap dolar Amerika sampai minggu kedua bulan Oktober 2018 telah menembus angka di atas Rp15.200 per dolar Amerika.

Indikator makroekonomi lain yang juga tidak menggembirakan yang terjadi pada tahun 2018 yakni defisit neraca transaksi berjalan (*current account*). Defisit neraca transaksi berjalan melebihi batas aman sebesar 3 persen. Nilai defisit tersebut yakni sebesar 8 miliar dolar AS dalam Triwulan II-2018. Besarnya defisit ini disebabkan adanya defisit neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) mencatat, neraca perdagangan Januari-September 2018 defisit sebesar 3,78 miliar dolar AS

Terjadinya defisit neraca berjalan dan khususnya neraca perdagangan ini tentu perlu untuk dipertanyakan. Pasalnya, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi saat ini semestinya justru merupakan peluang untuk meraih nilai ekspor yang besar. Ini sekaligus berimplikasi pada peningkatan pemasukan devisa. Hal ini disebabkan depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika berarti produk ekspor Indonesia akan menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan produk ekspor yang sama dari negara lain dalam hitungan dolar Amerika. Tidak terpengaruhnya penerimaan ekspor tersebut antara lain mengindikasikan bahwa daya saing produk ekspor nasional relatif rendah di pasar internasional. Keadaan ini cepat atau lambat namun pasti akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, peningkatan investasi, mengurangi jumlah penduduk miskin, maupun dalam menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Selain persoalan yang menyangkut masalah makroekonomi di atas, terdapat pula masalah yang menyangkut pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Padahal, kebijakan ini telah berlangsung sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Kedua undang-undang ini dalam perjalanannya telah mengalami revisi hingga yang terakhir menjadi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya revisi undang-undang di atas, banyak terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, khususnya hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dari berbagai permasalahan yang menyangkut kebijakan otonomi daerah, masalah desentralisasi fiskal dan pendapatan asli daerah merupakan dua masalah klasik yang masih perlu perhatian serius. Permasalahan ini telah menimbulkan persoalan tidak saja terkait dengan upaya membangun ekonomi daerah, tetapi lebih spesifik telah memengaruhi upaya pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, baik pada level provinsi, kabupaten maupun kota. Padahal, banyak penelitian yang menemukan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, pelayanan publik akan semakin baik (baca Faguet, 2004, Esteller-More, 2005 dan Alatas *et. al.*, 2012).

Masalah-masalah yang diungkapkan di atas tentu mutlak perlu untuk diperhatikan agar perekonomian nasional dan daerah pada tahun mendatang semakin membaik. Apalagi tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi kini dan ke depan akan semakin kompleks, dinamis dan penuh dengan ketidakpastian baik sebagai akibat datangnya tahun politik pemilihan umum 2019, maupun ketidakpastian global sebagai akibat dari antara lain perang dagang AS dengan Cina, kenaikan suku bunga AS, kenaikan harga minyak, revolusi industri 4.0 dan lain-lain. Beberapa masalah inilah yang menjadi latar belakang mengapa buku ini ditulis sebagai upaya urun rembuk dalam memikirkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sistematika Buku

Buku ini terdiri dari 8 Bab. Secara umum fokus bahasan dalam buku ini ditujukan untuk mendiskusikan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Dalam kaitannya dengan masalah perekonomian nasional, buku ini secara khusus difokuskan pada persoalan yang menyangkut nilai tukar, ekspor industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja serta energi baru dan terbarukan bagi pengembangan kelistrikan nasional. Sedangkan terkait perekonomian daerah, buku ini memfokuskan pada evaluasi kebijakan transfer fiskal, desentralisasi fiskal dan pelayanan publik, serta strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam mendiskusikan dan mengungkap masalah perekonomian nasional dan perekonomian daerah tersebut, data yang digunakan tidak terbatas dari literatur pencarian melalui website, dan sumber sekunder lainnya, namun juga melalui pengumpulan data survei lapangan. Survei lapangan khususnya dilakukan di Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian lapangan di kedua lokasi ini dimaksudkan khususnya untuk menajamkan analisis yang menyangkut desentralisasi fiskal dan pelayanan publik serta strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Lebih spesifik, sistematika buku ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan prolog atau pengantar untuk menjelaskan *state of the art* dan sistematika dari buku ini. Penjelasan *state of the art* dalam bab ini dimaksudkan untuk mengungkap latar belakang mengapa buku ini ditulis. Bab kedua membahas tentang nilai tukar, ekspor industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan tinjauan literatur. Dalam bab 2 ini ditelusuri dan didiskusikan konsep, literatur, dan hal-hal yang menyebabkan depresiasi nilai tukar dan kebijakan kompensasi untuk mengurangi dampak negatif dari depresiasi nilai tukar.

Bab 3 membahas konsep investasi, kebijakan investasi, perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta dampak investasi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan. Masalah ini dibahas karena upaya peningkatan investasi sejak pemerintahan Jokowi-JK ini semakin intensif baik dalam upaya membangun infrastruktur maupun dalam memperluas lapangan kerja. Enam belas paket kebijakan ekonomi pun dikeluarkan dimaksudkan secara khusus untuk mendorong masuknya investasi asing maupun domestik. Bahkan berbagai peraturan yang menghambat masuknya investasi juga dipangkas. Sasaran utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di satu pihak dan mengubah orientasi perekonomian dari semula bertumpu pada konsumsi menjadi perekonomian yang berorientasi pada produksi industri untuk kebutuhan domestik dan ekspor di lain pihak.

Berbeda dengan persoalan makroekonomi di atas, pada Bab 4 diungkapkan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengembangkan dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) bagi pengembangan kelistrikan di Indonesia. Perhatian terhadap pengembangan energi terbarukan ini selain akibat pasokan energi fosil khususnya minyak bumi yang semakin terbatas dan bahkan Indonesia sudah dikategorikan sebagai net importer minyak bumi, juga disebabkan tidak menentunya harga minyak bumi di pasar internasional. Apalagi kebutuhan minyak bumi untuk memenuhi pasokan listrik nyaris tidak dapat dikurangi sehingga diperlukan energi baru terbarukan untuk memenuhi pasokan kebutuhan listrik nasional. Materi yang dibahas dalam bab ini antara lain bagaimana upaya pemerintah mendukung pelaksanaan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan dalam pengembangan kelistrikan nasional. Selain itu juga dibahas kondisi listrik nasional, rencana pemanfaatan energi nasional, proyek pembangunan listrik nasional dan pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan. Pembahasan terkait energi terbarukan ini penting dibahas antara lain karena pola

perilaku masyarakat untuk menggunakan energi terbarukan terkesan tidak mudah. Masyarakat cenderung merasa nyaman dan sulit melepas ketergantungan terhadap energi fosil. Oleh karena itu, dukungan dari setiap lapisan masyarakat dibutuhkan agar pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dapat berjalan dengan baik.

Bab 5, mengevaluasi desentralisasi dalam kebijakan transfer fiskal. Hal ini dibahas karena pelaksanaan kebijakan transfer fiskal saat ini belum banyak memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Padahal, seluruh fungsi kewenangan dalam kebijakan transfer fiskal diserahkan kepada daerah, kecuali di 5 bidang kewenangan yakni keuangan dan moneter, pertahanan dan keamanan, sistem peradilan, keagamaan, dan politik luar negeri yang masih menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Bab 6 juga membahas masalah terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal dan kontribusinya terhadap pelayanan publik. Isu ini dibahas karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Dalam pembahasan masalah ini, survei lapangan di Provinsi Yogyakarta dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta. Hasil yang diharapkan dari kajian ini tidak saja dapat diketahuinya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik, melainkan juga dapat disusun strategi dan kebijakan dalam mengoptimalkan desentralisasi fiskal bagi pelayanan publik di Yogyakarta khususnya terkait sektor pendidikan dan kesehatan.

Sama halnya dengan Bab 6, Bab 7 juga membahas masalah terkait kebijakan desentralisasi fiskal. Fokus dalam bab ini tertuju pada upaya bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhatian pada PAD ini karena PAD merupakan salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan

desentralisasi fiskal dan semakin rendahnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Melalui pengumpulan data lapangan di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat diungkapkan kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Akhirnya sebagai bab penutup diungkapkan dan didiskusikan berbagai temuan dari masing-masing bab dalam buku ini dan bagaimana kebijakan yang harus ditetapkan mengatasi masalah-masalah kontemporer yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah.

BAGIAN KEDELAPAN

KEBIJAKAN MENGATASI MASALAH PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH: A WAY FORWARD

Carunia Mulya Firdausy

I. Pendahuluan

Perekonomian nasional dan daerah sampai menjelang akhir tahun 2018 menghadapi berbagai isu dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian di masa datang. Pada sisi perekonomian nasional, di antara berbagai isu dan permasalahan kontemporer yang dihadapi antara lain menyangkut defisit neraca transaksi berjalan, depresiasi rupiah yang belum menentu, ketergantungan pada konsumsi masyarakat, komoditas ekspor yang belum berdaya saing, harga minyak bumi yang cenderung meningkat, masih besarnya ketergantungan impor bahan baku dan barang modal serta penerimaan APBN yang terbatas. Akibatnya, bukan saja pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih jauh di bawah 5 persen, melainkan juga terbatasnya kemampuan untuk mendorong investasi dan menyerap tenaga kerja.

Pada sisi perekonomian daerah, masalah klasik menyangkut otonomi dan desentralisasi juga masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Padahal kebijakan otonomi dan desentralisasi sudah berusia 17 tahun sejak diundangkan pada tahun 2001. Akibatnya, upaya pemerintah daerah untuk pengembangan perekonomian daerah umumnya dan peningkatan pelayanan publik menjadi terbatas.

Isu dan masalah-masalah tersebut di atas tentu harus dijawab dan disikapi tidak saja oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah secara terintegrasi, terencana, terkoordinir, dan terkelola dengan baik. Perbaikan kebijakan ekonomi dan desentralisasi fiskal merupakan bagian penting yang harus dilakukan. Tanpa hal tersebut, isu dan permasalahan di atas dipastikan tidak dapat diatasi. Apalagi kondisi eksternal perekonomian semakin dinamis dan nyaris tidak menentu, baik sebagai akibat perubahan kebijakan berbagai negara maju, industri dan berkembang khususnya Amerika Serikat, Eropa, maupun Cina serta negara mitra ekonomi Indonesia lainnya. Hal yang sama juga menyangkut dinamika kondisi internal yang juga perlu diwaspadai baik sebagai akibat berkembangnya revolusi industri 4.0 dihadapkan dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbang saran positif terkait dua aspek. Pertama, terkait upaya mengatasi berbagai isu dan permasalahan menyangkut masalah nilai tukar, investasi, industri manufaktur, pengangguran dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Kedua, menyangkut kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal daerah dan bagaimana mendorong desentralisasi fiskal agar mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayan publik serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini diungkapkan beberapa temuan dan masukan kebijakan yang diungkapkan dari masing-masing bab dalam buku ini.

II. Kebijakan Mengatasi Depresiasi Rupiah terhadap Inflasi

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi saat ini di atas 10 persen salah satunya dapat menimbulkan inflasi. Jika hal ini terjadi, untuk mengkompensasi dampak inflasi tersebut dapat diterapkan kebijakan stabilisasi biaya hidup. Kebijakan stabilisasi biaya hidup tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) sisi yaitu sisi pengeluaran dan sisi pendapatan.

Dari sisi pengeluaran, kebijakan stabilisasi biaya hidup dapat dilakukan dengan melakukan stabilisasi terhadap harga terutama harga-harga komoditas pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini karena kondisi harga komoditas pokok yang stabil dapat memperbaiki daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga mencegah naiknya tingkat kemiskinan. Selain kebijakan stabilisasi harga produk bahan pokok, kebijakan lain yakni dengan menyediakan produk-produk bahan pokok jumlah yang cukup. Namun jika harga di dalam negeri di atas harga dunia, pemerintah bisa melakukan stabilisasi harga melalui impor yang bersifat sementara. Salah satunya, pemerintah bisa mengenalkan konsep stabilisasi harga melalui kebijakan tarif impor. Melalui kebijakan tarif impor, fluktuasi harga yang terjadi di pasar internasional ditransmisikan ke perekonomian domestik. Jika dengan penerapan kebijakan tersebut, harga di dalam negeri akan mengalami kenaikan, salah satu kebijakan stabilisasi harga yang dapat dilakukan adalah menerapkan kebijakan penghilangan tarif atau kuota impor.

Dari sisi pendapatan, kebijakan stabilisasi biaya hidup dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Biaya hidup masyarakat yang stabil akan tetap terjaga jika daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Kondisi ini dapat terjadi jika masyarakat memiliki uang yang dapat dibelanjakan atau dengan kata lain masyarakat tersebut mempunyai penghasilan (*income*). Salah satu cara agar masyarakat memiliki penghasilan adalah mereka harus mempunyai pekerjaan. Terciptanya lapangan kerja, salah satunya karena adanya ekspansi di dunia usaha. Meningkatnya volume *output* dari industri manufaktur *labor-intensive* akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, perhatian terhadap kedua kebijakan ini penting diberikan agar depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang sedang terjadi tidak memberikan implikasi pada inflasi.

III. Kebijakan Pengembangan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja

Pemerintah terus mengupayakan masuk dan berkembangnya investasi. Hal ini antrara lain ditunjukkan dengan dikeluarkannya 16 paket kebijakan ekonomi. Adapun jenis investasi yang diharapkan masuk dan berkembang tidak hanya Investasi Langsung (*Direct Investment*), tetapi juga investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*). Khusus untuk investasi asing, perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur mutlak tidak dapat diabaikan. Namun agar investasi tersebut memberikan kontribusi dalam penyerapan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah baik pusat dan daerah sebaiknya melakukan dan mengarahkan investasi tidak hanya pada industri padat modal yang lebih banyak menggunakan investasinya dalam bentuk mesin-mesin agar tenaga kerja tidak digantikan fungsinya oleh mesin, melainkan juga mendorong investasi dalam bentuk padat karya. Selain itu, pemerintah baik pusat maupun daerah harus pula dapat mendorong peningkatan investasi melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

IV. Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan bagi Pasokan Listrik

Perkembangan pertumbuhan energi listrik dari energi terbarukan masih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi tenaga listrik dari energi tak terbarukan. Sesuai dengan target dalam KEN, bahwa Indonesia harus dapat mencapai suplai energi listrik dari energi terbarukan sebesar 23% pada akhir 2025. Artinya, porsi energi tak terbarukan untuk menghasilkan listrik masih cukup besar

mencapai 85-90%. Bahkan pemerintah sudah menetapkan target pada tahun 2050 sebesar 31% dari energi terbarukan.

Jika melihat kondisi terkini saat ini sampai akhir 2017 lalu, tampak bahwa produksi kapasitas energi listrik dari energi terbarukan baru mencapai 6-7% dari total kapasitas listrik yang ada saat ini. Jika pada akhir 2019 energi listrik dari sumber energi terbarukan dapat dicapai sekitar 8-10%, sudah merupakan hal yang luar biasa. Sedangkan target rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2020 harus sudah mencapai 100% sesuai KEN. Saat ini baru mencapai 95-97%.

Oleh karena itu, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk pasokan listrik nasional ke depan harus dimulai dari kajian terhadap potensi EBT yang paling mudah dan murah untuk dikembangkan. Di samping panas bumi yang sudah dikembangkan dan sudah berproduksi, perhatian terhadap energi surya, mikrohidro, biomassa (sampah), dan energi angin juga perlu diberikan. Hal ini tidak hanya guna mengejar target pencapaian program 35.000 MW tetapi juga untuk mencapai ketahanan energi nasional. Apalagi payung hukum berupa undang-undang EBT telah tersedia seperti UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pentingnya pengembangan EBT selain dapat menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan, EBT juga dapat mendorong industri-industri termasuk industri otomotif yang menghasilkan kendaraan bermotor listrik. Jika pemerintah tidak serius mengembangkan EBT, maka target energi terbarukan sebesar 23% tidak akan tercapai pada tahun 2025.

V. Kebijakan Desentralisasi Kebijakan Transfer Fiskal

Kebijakan transfer fiskal selama ini diakui masih banyak tantangan dan kendala pada saat pelaksanaannya, walaupun ada beberapa daerah yang cukup berhasil dalam pemanfaatan dana transfer fiskal tersebut. Namun diakui pula bahwa banyak daerah

yang belum optimal memanfaatkannya. Jumlah anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun kian meningkat, akan tetapi, masih menghadapi adanya ketimpangan fiskal dan layanan publik antardaerah, serta tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi di beberapa daerah.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa catatan berikut. Pertama, perlunya perubahan pola dalam mengoptimalkan dana transfer fiskal daerah pusat melalui sistem kontrak yang mengikat dengan indikator yang terukur. Dalam sistem kontrak tersebut pemerintah pusat dan daerah perlu membuat perjanjian tertentu agar daerah menjalankan target-target pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat. Dari kebijakan transfer fiskal yang diterima, kemudian perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai daerah tersebut setelah transfer fiskal diberikan. Dengan kata lain, keberhasilan dan optimalisasi penggunaan dana dari transfer fiskal tersebut tidak boleh hanya melihat hasil pelaporan akuntansi saja, namun juga mengkaji tingkat kinerja dari seluruh anggaran transfer fiskal yang diperoleh baik melalui DAU, DBH, DAK dan Dana Otsus.

Kedua, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kapasitas, kesiapan, dan kemampuan dari perangkat pemerintah daerah. Pentingnya evaluasi terhadap kapasitas, kesiapan, dan kemampuan dari perangkat birokrasi dimaksudkan agar tujuan melakukan desentralisasi fiskal secara khusus dapat tercapai dengan maksimal. Pimpinan Daerah khususnya harus memiliki integritas tinggi dalam pengelolaan anggaran transfer fiskal tersebut agar tidak terjerat pada korupsi, nepotisme dan kolusi.

VI. Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pelayanan Publik

Desentralisasi fiskal diharapkan sejatinya dapat memberikan dua manfaat nyata. Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta

mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat. Kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Pemberian desentralisasi terhadap pemerintah daerah juga cenderung berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan pemerintahan yang sentralistik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pemerintah daerah yang desentralisasi lebih sejahtera dibandingkan pemerintah daerah yang sentralistik disebabkan dampak dari pemberian wewenang yang lebih kepada pemerintah daerah yang terdesentralisasi untuk lebih memberikan pilihan dan kemampuan yang lebih bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sedangkan pemerintah daerah yang sentralistik tidak dapat dengan jelas memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah itu karena sifatnya terbatas dalam pilihan kebijakan yang sentralistik.

Kajian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti telah memberikan banyak dampak positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di daerah. Dampak peningkatan dana desentralisasi tersebut memberikan dampak terhadap belanja kesehatan pemerintah daerah. Hal yang sama juga terjadi untuk belanja pendidikan pemerintah daerah, dimana setiap peningkatan dana desentralisasi berdampak terhadap peningkatan belanja sektor pendidikan. Berdasarkan hasil tersebut, maka sudah waktunya bagi Pemerintah Daerah untuk mengarahkan *policy* dana desentralisasi kepada pengeluaran pemerintah daerah untuk lebih menekankan kepada belanja publik khususnya bagi sektor pendidikan dan kesehatan.

VII. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Daerah disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Namun ditemukan berbagai kendala dalam meningkatkan PAD masih ditemukan berbagai kendala. Dalam hal pemungutan pajak BPHTB, misalnya, penetapan biaya NJOP TKP dalam penerapannya menjadi sangat tidak relevan ketika berhadapan dengan regional yang tingkat pertumbuhan ekonominya berbeda. Oleh karena itu, penetapan NJOP TKP berdasarkan besarnya pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah perlu diperhatikan.

Di dalam pengembangan/peningkatan PAD, kendala juga ditemukan terkait dengan batas-batas *close list* pajak dan retribusi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 di mana tidak semua jenis pajak dan retribusi dapat dipungut. Selain itu terdapat potensi pajak dan retribusi yang tidak terdapat di UU No. 28 Tahun 2009. Hal ini dapat memangkas semangat otonomi daerah di mana salah satunya daerah diberi kewenangan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Namun dengan adanya *open list*, maka membuat daerah terlalu kreatif dalam memungut pajak dan retribusi. Untuk itu perlu instrumen diskresi yang diberikan oleh daerah dalam memungut pajak.

Perda-perda yang diterbitkan dalam mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga menjadi kendala tersendiri dalam optimalisasi peningkatan PAD. Hal ini karena banyak perda yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, terjadi kesulitan bagi pengusaha dalam memahaminya dan bahkan telah menimbulkan kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh pusat.

Oleh karena itu belajar dari Kabupaten Bojonegoro, strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan PAD yakni dengan membentuk tim ekstensifikasi dan intensifikasi, meningkatkan kualitas sumber daya petugas pajak, dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pendapatan daerah seperti melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta melakukan terobosan-terobosan seperti sistem *online* dalam sistem pembayaran dan pelaporan.

INDEKS

A

alokasi, 31, 77, 85, 86, 87, 96, 101
akuntabel, 115
Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), 89, 89, 90, 92, 961, 110, 144, 145
Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), 1, 64, 78, 84, 87, 90, 95, 96, 103, 110, 159

B

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 45
Badan Pusat Statistik (BPS), 2
Bappenas, 102
Bahan Bakar Minyak, 57, 68
Bahan Bakar Nabati, 67, 78
batubara, 56, 59, 60, 63, 68
belanja daerah, 85, 95, 96, 145
biaya hidup, 16, 17, 18, 21, 24, 160, 161
birokrasi, 42, 85, 89, 95, 108, 112, 116, 164
bioenergi, 57, 70, 76, 78
biofuel, 78
biomassa, 67, 70, 78, 79, 163

D

dana, 33, 64, 84, 87, 95, 101, 112, 123

Dana Alokasi Khusus (DAK), 84, 89, 95, 96, 101, 102, 103, 111
Dana Alokasi Umum (DAU), 84, 95, 96, 98, 100
Dana Bagi Hasil (DBH), 84, 101
dana desa, 86, 88, 90
dana desentralisasi, 129, 133, 134
dana otonomi khusus, 89, 103, 105, 107
dana perimbangan (DP), 96, 97, 99
dana reboisasi, 109
dana tambahan infrastruktur, 104, 105, 111
dana transfer umum, 98
daya beli, 11, 17, 18, 21, 161
daya saing, 2, 10, 13, 15, 31, 125, 139
depresiasi, 2, 4, 9, 11, 12, 23, 159, 160
desentralisasi, 83, 84, 86, 90, 93, 95, 96, 98, 114, 119, 120, 121, 124, 129, 132, 140, 145, 159, 165
fiskal, 91, 93, 94, 107, 114, 115, 123, 125, 130, 134, 160, 163, 164
devaluasi, 9, 11, 12, 15, 16, 23, 24

E

efektivitas, 111, 112, 114, 145
efisien, 14, 38, 39, 50, 65, 106, 112, 115

- ekonomi, 1, 4, 12, 29, 34, 36, 37, 45, 55, 59, 84, 113, 162
daerah, 3, 143
kreatif, 122
krisis, 10
pertumbuhan, 1, 4, 5, 9, 14, 16, 22, 24, 29, 30, 31, 38, 48, 89, 106
ekspor, 2, 4, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 31, 159
industri manufaktur, 11, 12, 14, 15, 22
elastisitas, 10, 66
energi, 5, 55, 56, 63, 65, 67
 angin, 66, 70, 71, 79, 163
 baru, 5, 55, 57, 67, 70
 bauran, 64, 66, 71, 73
 diversifikasi, 63, 67, 71
 fosil, 5, 6, 55, 56, 58, 59
 kemandirian, 65, 66
 ketahanan, 56, 58, 61, 62, 65, 79
 listrik, 60, 62, 68, 69, 162, 163
 non-fosil, 55
 nuklir, 62
 primer
 sinar matahari, 68, 69
 subsidi, 64, 77
 sumber, 66
 terbarukan, 5, 6, 55, 56, 57, 59, 61, 64, 66, 67, 70
- F**
fosil, 5, 55, 56, 58, 75
- G**
garis kemiskinan, 17
gas bumi, 59, 109
geothermal, 61
- H**
head count index, 20
- I**
implementasi, 78, 86, 94, 116
impor, 9, 10, 16, 19, 62, 159
 tarif, 19, 20
indirect linkage effect, 22
Indonesia, 3, 5, 13, 22, 30, 42, 43, 44, 47, 55, 57, 59, 61, 68, 79, 83, 93, 95, 107, 115, 119, 143, 156
 ekonomi, 42, 45, 160
 pembangunan, 87
industri manufaktur, 9, 11, 12, 14, 18, 23, 160
inflasi, 11, 17, 24, 45, 160, 161
infrastruktur, 5, 31, 35, 38, 39, 57, 63, 98, 105, 113, 125, 162
insentif, 31, 60, 84, 89, 90, 113
institutional weakness, 12, 13
instrumen, 11, 31, 84, 96, 115, 145, 166
investasi, 32, 33
 asing, 48
 langsung, 34
 manfaat, 35, 36
 publik, 34
 swasta, 35
 tidak langsung, 34
- K**
kebijakan, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 31, 40, 62, 65, 83, 98, 106, 108, 112
 desentralisasi fiskal, 86, 107, 123, 164
Kebijakan Energi Nasional (KEN), 56, 59
kegagalan pasar, 13, 14, 23
Kementerian ESDM, 60, 70, 74
Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), 43

Indeks

ketidakpuasan, 119, 120
ketidaksempurnaan pasar, 13
ketimpangan, 30, 85, 89, 107
keuangan, 6, 34, 85, 91, 92, 102, 111, 120, 123, 144, 166
kewenangan, 6, 84, 85, 93, 104, 123, 139, 144
kompensasi, 4, 11, 14, 16, 96
komponen, 11, 36, 67, 69, 84, 92, 96
kualitas, 6, 13, 14, 73, 87, 110, 135

L

labor intensive, 12, 15, 18, 21, 24, 161
lapangan kerja, 4, 5, 15, 21, 22, 23, 29, 30, 45, 50, 161
learning externalities, 13
listrik, 5, 39, 59, 60, 62, 68, 69, 72, 162

M

makroekonomi, 2, 5, 17, 112
market failure, 12, 13, 14, 15

N

neraca, 2, 9, 10, 45, 159
nilai tukar, 4, 9, 10, 14, 16, 23, 160
nilai tukar riil, 10, 11, 21
non-tradable, 9, 14

O

overvalued, 10

P

Paket kebijakan ekonomi, 31, 40, 42, 45, 47, 51, 160, 162
pajak, 14, 19, 43, 84, 101

panas bumi, 57, 61, 67, 70, 76, 79, 163
pelayanan publik, 4, 6, 84, 94, 98, 114, 119, 121, 122, 123, 126
Penanaman Modal Asing (PMA), 32, 52
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 32, 51
pendapatan, 9, 11, 18, 21, 24, 30, 38, 49, 87, 96, 115, 140
Pendapatan Asli Daerah (PAD), 4, 6, 84, 140
pendidikan, 48, 51, 89, 104, 105, 121, 122, 125, 126, 130, 131, 135
penerimaan, 2, 6, 20, 84, 90, 101, 106, 140
pengangguran, 11, 16, 24, 29, 30, 31, 47, 48, 87, 90, 115, 160, 164
pro-growth, 10, 16, 23
pro-job, 16
pro-poor, 16
PNBP, 108
PLTU, 59, 61, 63, 79
PLTS, 69, 70
PLTP, 61
PLTN, 62
PLTB, 71, 72
PLTMH, 68, 70, 71, 78
PT PLN, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 72, 78

R

rasio, 57, 60, 66, 99, 100, 163
 elektrifikasi, 57, 60, 66, 163
recovery, 10
RKPD, 110
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD), 110
Rencana Umum Energi Nasional, 59
Rencana Umum Energi Daerah, 77

retribusi, 84, 151
daerah, 84, 140, 143, 146, 148,
151
jasa umum, 148
jasa usaha, 149
perizinan, 149

S

sisi pendapatan, 18, 21, 24, 161
sisi pengeluaran, 18, 21, 24, 161
stabilisasi, 16, 18, 19, 21, 24, 160
stagflation, 11
suku bunga, 3, 37, 162
nominal, 37
riil, 37
sumber daya alam (SDA), 84, 99, 108

T

TKDD, 106, 111
tradable, 9, 12, 14, 21
transaksi berjalan, 9, 10, 45, 159

transfer, 84, 88, 95, 107, 108, 111,
125, 164
fiskal, 4, 6, 83, 84, 86, 87, 90, 92,
94, 101, 103, 106, 107, 112,
114, 114, 116, 163

U

undervaluation, 14, 15, 16, 23
upah, 9, 13, 21

V

value added, 22

W

World Bank, 43

TENTANG EDITOR

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanegara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree* di bidang *Agricultural Development Economics* (MADE) dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputi Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST).

Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makroekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS, dan *World Bank*; (c)

dosen dan pembimbing mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3, untuk mahasiswa di beberapa universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) mitra bestari Buletin Ilmu Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, AS; (g) editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *coordinator East Asian Development Network* (EADN) untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank* (ADB) sejak tahun 2010.

Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank* (ADB), *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies* (ISEAS), ILO, dan UN-ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN-ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

TENTANG PENULIS

Mandala Harefa, adalah peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang merupakan alumnus Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Penulis pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik bidang desentralisasi dan ekonomi regional yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam membuat kajian, analisa kebijakan, proses dalam mendukung penyusunan RUU menjadi undang-undang dan mempersiapkan makalah bagi pimpinan, alat kelengkapan dewan dan apara anggota DPR RI. Sebagai peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang topiknya berkaitan dengan permasalahan terkait kebijakan publik sesuai dengan fungsi kedewanan antara lain keuangan Negara dan Daerah, ekonomi Regional dan topik lainnya terkait dengan ekonomi publik BUMN dan UMKM yang telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR dan Balai Pustaka serta penerbit lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: manhar@dpr.go.id

Juli Panglima Saragih, lahir di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 1964. Saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IVC dengan jabatan Fungsional Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak 1990. Pendidikan formal adalah Sarjana (S1) dari FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung Tahun 1988. Pascasarjana

(S2) Magister Manajemen (MM) dari Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Aktif menulis di surat kabar nasional dan daerah, dan beberapa majalah dalam negeri sejak 1992. Menulis buku tentang: 'Desentralisasi fiskal ...' yang diterbitkan oleh Penerbit PT. Ghalia Indonesia (GI), Jakarta, April 2003, dan beberapa buku lain-nya. Aktif melakukan penelitian di dalam negeri, dan mengikuti berbagai seminar, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan peneliti dan keparlememen. Anggota Tim Asistensi Pembuatan/Perancangan UU: UU tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU tentang Perlindungan Konsumen; UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU tentang Perindustrian; UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU tentang Lembaga Keuangan Mikro; UU tentang Perasuransian; UU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Melakukan kunjungan kerja kedinasan ke luar negeri tentang keparlemenan: Amerika Serikat (2000) dan (2008), Australia (2006), Kanada (2015), India (2004), Filipina (1999), Thailand (1999), Viet Nam (1999) dan (2018).

Achmad Sani Alhusain, SE.,MA., Lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan Master of Art in Economic Policy di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA, 2002. Penulis merupakan Peneliti Madya Golongan IV/a dengan bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisan yang sudah diterbitkan antara lain berjudul: Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia, dan Upah Minimum: Kebijakan, Permasalahan dan Solusi. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisa yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam

Tentang Penulis

proses pembentukan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran. Email: sani_alhusain@yahoo.com.

Ari Mulianta Ginting adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Moneter diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Moneter. Tahun 2017 memulai kuliah Doktor Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi *Public Policy* di Universitas Trisakti. Bekerja di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer sejak tahun 2008 hingga sekarang untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Pelita Harapan dari tahun 2015 hingga sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : ari.ginting@dpr.go.id

Rasbin menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Pertanian Departemen Teknologi Industri di Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2004, pendidikan Master Sains (S2) Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya dengan Kekhususan Ekonomi Perdagangan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Nilai Tukar, Upah Tenaga Kerja, dan Daya Saing Industri Manufaktur” (2017), “Alternatif Pembiayaan Ekonomi

Kreatif di Indonesia” (2017), dan “Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi: Studi Kasus di Indonesia” (2016). Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : rasbin@dpr.go.id.

Lisnawati, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2005. Pendidikan S2 diselesaikan di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini terlibat aktif dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik di antaranya penelitian tentang Konektivitas. Penulis dapat dihubungi melalui email: lisnawati.dpr@gmail.com.